BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri sebagai warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yag diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Gede *et al.*, 2013). Untuk itulah PPKn dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum tujuan mengembangkan PPKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, kedudukan PPKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi.

Sejalan dengan hal di atas maka PPKn sangatlah penting diterapkan untuk mendidik generasi bangsa untuk secara sukarela mengingatkan diri pada norma atau nilai-nilai moral.

PPKn lebih bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil dari disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, administrasi negara, tata negara, sejarah, filsafat dan berbagai kajian lainnya yang berasal dari nilai budi pekerti, hak-hak asasi manusia dengan penekanan kepada hubungan antara warga dengan pemerintah, serta hubungan antar negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan mata pelajaran PPKn bukan merupakan mata pelajaran hafalan, oleh karenanya para siswa harus diajak untuk berwarganegara dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa sosial, sehingga nantinya siswa dapat mengembangkan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan hakikat mata pelajaran PPKn.

Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai lanjutan pendidikan dasar, lebih menekankan pada usaha untuk menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu digunakan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau

dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Pratiwi, Sulaimi and Yuliatin, 2018).

Dalam dimensi sikap, seorang peserta didik dalam jenjang pendidikan SMP dituntut untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk dimensi pengetahuan, seorang peserta didik dalam jenjang pendidikan SMP dituntut untuk memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Serta dimensi keterampilan, seorang peserta didik dalam jenjang pendidikan SMP dituntut untuk memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia belum mampu menyesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang diamanatkan pemerintah. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia masih saja terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif siswa. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; yang menjadikan otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan sikap dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Gejala semacam ini merupakan

gejala umum dari hasil pendidikan selama ini, pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengakibatkan ketika siswa tersebut lulus dari sekolah mereka akan pintar secara teoritis, namun mereka cenderung miskin dalam aplikasi. Oleh karena itu terkait dengan pentingnya peran PPKn dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan, yang ditekankan pada pembentukan sikap dan pengembangan kecerdasan atau intelektual (pengetahuan), serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhannya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut.

Upaya penyempurnaan kurikulum terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, memperlihatkan bahwa dunia pendidikan kita dituntut untuk berbenah. Berikutnya dengan ditetapkannya Permendiknas No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 21 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Isi Lulusan, maka satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum 2013. Melalui upaya tersebutlah pemerintah berharap dapat dibentuk suatu pedoman yang bisa dijadikan rujukan bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung, yang

bermuara pada proses pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Semua upaya pemerintah tersebut tentu dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas, dimana semua komponen yang bergerak di dunia pendidikan harus memiliki visi, misi dan strategi yang tepat untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Untuk melaksanakan proses tersebut maka sosok guru yang memiliki keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kompetensi dan kreatifitas peserta didik sangat diperlukan. Hal ini mengisyaratkan perubahan paradigma pendidikan, dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. Pembelajaran yang merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Hal tersebut tentu harus sejalan dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan ialah : (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis

kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills);* (9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo)*, membangun kemauan (*ing madyo mangun karso)*, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani);* (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik (Khairani Miftahul, Sutisna, 2019).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan maka salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah.

Terkait dengan hal di atas, dikembangkan standar proses yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas "menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan". Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas "mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta". Keterampilan diperoleh melalui aktivitas "mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta". Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian *(discovery/inquiry learning)*. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning)* (Hairida and Junanto, 2018).

Untuk dapat melaksanaan pembelajaran PPKn di SMP yang sesuai dengan hakekat mata pelajaran PPKn dan Standar Kompetensi Lulusan serta

Standar Isi dalam Kurikulum 2013, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini khususnya akan menjadi pekerjaan besar bagi guru-guru PPKn. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kegiatan mengajar PPKn kepada pelajar tingkat SMP bukanlah perkara yang gampang. Untuk itulah maka pelaksanaan Standar Proses yang mencakup kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia menjadi sangat penting perannya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.

Standar proses mencakup empat hal yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP pelaksana kurikulum 2013 di Kodya Denpasar perlu mendapat perhatian khusus dengan melakuakan evaluasi apakah standar proses sudah berjalan secara efektif atau belum. Peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan guru mata pelajaran PPKn , menyadari pentingnya pelaksanaan standar proses ini khususnya pada pembelajaran PPKn dalam rangka tercapainya proses pembelajaran dengan baik yang akan berkorelasi dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.

Berkenaan dengan pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn sesungguhnya sangat bijaksana bila dilakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dijalani. Karena dengan mengkaji kembali langkah-langkah yang telah

dicapai dan apa yang sedang berlangsung pada suatu program merupakan suatu ikhtiar yang sangat positif. Dengan melakukan hal itu kita dapat memilah hal-hal yang baik dari sekumpulan tindakan yang telah dilakukan dan merevisi rencana yang belum terlaksana. Untuk itu pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn di SMP pelaksana kurikulum 2013 sangat penting untuk dievaluasi. Dari evaluasi yang ini diharapkan akan diperoleh *feedback* untuk perbaikan program tersebut, sehingga keunggulan-keunggulan program tersebut dapat dilanjutkan dan kelemahan-kelemahan program tersebut dapat dieliminasi untuk kesempurnaan program selanjutnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, standar proses pada pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, yang belum berjalan maksimal merupakan cerminan dari berbagai masalah yang menimbulkan hambatan untuk meraih prestasi maksimal sehingga perlu dilakukan studi evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Secara umum dalam ilmu manajemen, suatu organisasi akan berhasil mencapai tujuan jika menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan Pengendalian (*controlling*). Dalam dunia pendidikan khususnya satuan pendidikan juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Jika satuan pendidikan mengelola proses pembelajaran tidak optimal maka hal itu akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Adanya kecenderungan guru PPKn kurang memahami kurikulum 2013 sehingga kualitas proses pembelajaran belum optimal.
2) Input siswa yang masuk ke sekolah berasal dari bebagai karakteristik, akibatnya berpengaruh terhadap strategi belajar untuk mengoptimalkan belajarnya.
3) Adanya kecenderungan siswa lemah dalam materi-materi yang kompleks akibatnya proses pembelajaran menjadi terhambat.
4) Adanya kecenderungan minimnya sumber belajar, minimnya latihan soal-soal yang dilakukan, mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep siswa.
5) Adanya kecenderungan guru kurang memahami kompetensi yang harus dimiliki sehingga dalam melaksanakan tugasnya kurang profesional.
6) Adanya kecenderungan belum tepatnya persiapan mengajar yang dibuat oleh guru misalnya dalam penentuan sumber dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, penilaian dan evaluasi hasil belajar, serta yang lainnya akibatnya mengganggu efektifitas proses pembelajaran.
7) Adanya kecenderungan banyaknya siswa dalam satu kelas dan sistem penempatan siswa didalam kelas dapat mengganggu efektifitas proses pembelajaran.

8) Adanya pengaruh eksternal baik langsung maupun tidak langsung terhadap guru dan siswa dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn .
9) Adanya kecenderungan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, sehingga pelaksanaan standar proses dalam pembelajaran PPKn menjadi sesuai tujuan.
10) Adanya kecenderungan pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn yang menggunakan kurikulum 2013 tidak efektif dan tidak berkualitas ditinjau dari segi konteks, input, proses dan produk sehingga pelaksanaan standar proses tidak optimal.

Oleh karena itu dalam tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah menengah pertama yang lebih memfokuskan pada usaha untuk menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka dalam proses pembelajaran haruslah menekankan isi materi pembelajaran PPKn yang sejalan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga peserta didik memiliki kesiapan dalam menghadapi pengaruh era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn di SMP pelaksana kurikulum 2013, hal ini sangat berguna untuk perbaikan dalam menjawab berbagai kelemahan dan hambatan yang ada.

Atas dasar sedemikian kompleksnya permasalahan yang menghambat

standar proses khususnya pada pembelajaran PPKn, maka dipandang perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga hasil penelitian menjadi lebih jelas dan lebih fokus pada pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti secara lebih cermat

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengelola pembelajaran PPKn yang berprinsip pada: proses mencari tahu; belajar berbasis aneka sumber belajar; penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; pembelajaran berbasis kompetensi; pembelajaran terpadu; pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; keterampilan aplikatif; peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills);* pembelajar sepanjang hayat; pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo)*, membangun kemauan (*ing madyo mangun karso)*, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani);* pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat; pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Batasan masalah yang diteliti dengan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertama, efektifitas pelaksanaan standar proses pendidikan ditinjau dari dimensi *conteks* (konteks). Kedua, efektifitas pelaksanaan standar

proses pendidikan ditinjau dari dimensi *input*. Ketiga, efektifitas pelaksanaan standar proses pendidikan ditinjau dari dimensi *proses*. Keempat, efektifitas pelaksanaan standar proses pendidikan ditinjau dari dimensi *produk*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1) Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi konteks ?
2) Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi input ?
3) Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi proses ?
4) Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi produk ?
5) Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar dan alternatif pemecahan masalahnya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disampaikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi konteks.
2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi input.
3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi proses.
4) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar, ditinjau dari dimensi produk.
5) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar dan alternatif pemecahan masalahnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktis. Ditinjau dari apek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembangan ilmu dan memperkaya wawasan keilmuan dalam peningkatan pembelajaran

PPKn . Sedangkan ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru PPKn maupun guru mata pelajaran yang lainnya, peserta didik, dan satuan pendidikannya, yaitu sebagai berikut.

1) Untuk pihak manajemen setiap SMP Swasta se- Kodya Denpasar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan standar proses dengan baik sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Penteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
2) Untuk para guru PPKn agar mengetahui efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar, ditinjau dari model *CIPP* serta dapat mengimplementasikan komponen standar proses dalam pembelajaran PPKn, sehingga nantinya dapat mengetahui hambatan yang ditemukan serta mampu mencarikan solusinya.
3) Untuk para akademisi (mahasiswa), untuk dapat digunakan sebagai bahan pengembangan evaluasi proses pada pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn di kemudian hari.

1.7 Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan untuk menghindari adanya perbedaan pengertian, perlu ditampilkan penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk

kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.
2) Model CIPP adalah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management-oriented evaluation approach*) atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (evaluation in program management) yang terdiri dari: *contexs evaluation, input evaluation, process evaluation product evaluatioan.*
3) Standar Proses merupakan suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

1.8 Rencana Publikasi

Luaran penelitian akan di publikasikan pada Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha (https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ep).